

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan diuraikan beberapa hal yang melatarbelakangi topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta bagaimana hal tersebut dapat membentuk struktur organisasi skripsi ini. Pembahasan dalam bab pendahuluan ini mencakup sejumlah aspek penting yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, yang nantinya akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai arah fokus penelitian ini. Beberapa hal yang akan dibahas meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Adapun hal yang berkaitan dengan pendahuluan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik bahkan merusak nilai dan moral demokrasi. Diasumsikan bahwa korupsi memiliki hubungan negatif dengan transparansi. Menurut Matheson & Kwon (2003), kepatuhan yang tidak memadai terhadap aturan akuntansi dan pelaporan, kurangnya standar akuntansi, serta pelaporan dan kepatuhan, memiliki hubungan positif dengan risiko korupsi. Fozzard & Foster (2001) menyatakan bahwa transparansi pemerintah adalah aspek penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Berbagai negara, kurangnya transparansi dapat mendukung praktik korupsi menurut Tanzi dalam Wibisono & Khoirunurrofik (2023).

Menurut *Transparency International*, korupsi merujuk pada tindakan pejabat publik, baik itu politisi atau pegawai negeri, yang secara tidak sah dan tidak etis memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang terdekat mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka (Benito et al., 2018). Semua jenis pemerintahan pada dasarnya dapat terpapar pada

korupsi, yang tingkatannya bervariasi, mulai dari yang ringan, seperti pemanfaatan pengaruh untuk memberikan atau menerima bantuan, hingga yang lebih serius.

Selama beberapa beberapa tahun, organisasi internasional telah membantu negara-negara berkembang dalam membangun sistem anggaran yang baik, tetapi dalam kebanyakan kasus hasil fiskalnya (pendapatan negara) terus-menerus buruk. Sebagian besar negara berkembang sekarang memiliki sistem anggaran formal yang memenuhi standar dasar, sedangkan negara-negara maju menikmati prosedur akuntansi pemerintah yang maju menurut (Schick, 2003). Semua alasan ini membuat kita berasumsi bahwa pembangunan ekonomi terkait positif dengan transparansi pemerintah. Hal ini telah dibahas sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi, serta kinerja ekonomi berdasarkan (Kopits & Craig, 1998). Cara yang sama dengan Gulsun Arikian (2004) mengungkapkan bahwa negara yang lebih kaya cenderung memiliki laporan anggaran yang lebih transparan.

Negara yang tingkat kekayaannya lebih tinggi (dalam hal PDB per kapita) cenderung tidak terlalu khawatir tentang biaya yang relatif tinggi yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyediaan informasi. Oleh karena itu, negara-negara tersebut lebih mungkin untuk mengesahkan undang-undang yang mendukung akses informasi (lebih transparan). Sebaliknya, negara-negara yang lebih miskin mungkin menghadapi hambatan terkait biaya yang diperlukan untuk menyediakan informasi publik, yang dapat menghalangi penerapan undang-undang semacam itu. Selain itu, di negara-negara dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi, warga negara cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk meminta informasi terkait pemerintah dan kebijakan, karena tingkat kepuasan terhadap tindakan pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lebih kaya.

Transparansi laporan anggaran memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat korupsi, yang berarti semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin transparan laporan anggarannya. Kualitas laporan anggaran suatu negara berhubungan dengan tingkat perkembangannya. Namun, negara-negara yang menerima bantuan finansial dan teknis IMF (Dana Moneter Internasional)

atau *World Bank* memenuhi lebih sedikit rekomendasi *Budget Transparency* (OBP) dibandingkan negara-negara yang tidak menerima bantuan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa negara-negara ini tidak memperhitungkan bantuan IMF (Dana Moneter Internasional) atau *World Bank* melalui keuangan pemerintah laporan keuangan, tetapi melalui laporan *ad hoc*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, penyalahgunaan kewenangan meliputi tindakan seperti suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, penipuan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Namun, definisi KPK ini lebih berfokus pada aspek formal yang berkaitan dengan peran organisasi pemerintah, tanpa membahas secara eksplisit membahas dampak sosial di luar birokrasi. Padahal, korupsi seharusnya tidak hanya dilihat dari dimensi formal, tetapi juga dari dimensi politik, sosiologis, ekonomi, dan pendidikan. Namun yang terpenting dalam semua dimensi tersebut adalah masalah etika, karena korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari norma etika dan merugikan pihak lain. Perilaku seperti menyontek di sekolah, berbohong, atau menyuap merupakan contoh tindakan menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus semacam ini sering diterjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam beberapa hal sudah menjadi bagian dari budaya. Jika diamati lebih dalam, korupsi memiliki dampak yang luas hampir di semua aspek kehidupan bangsa ini.

Korupsi yang semakin meresahkan juga mencemari sistem hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan penegakan aturan. Hukum tidak luput dari dampak buruk korupsi, di mana praktik suap menyuap telah merusak rasa keadilan. Investasi politik dalam proses hukum menyebabkan lembaga peradilan hanya berfungsi sebagai alat politik kekuasaan. Korupsi mengganggu mekanisme pasar dan merusak sektor publik serta swasta, yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan masyarakat. Oleh karena itu ICW (*Indonesia Corruption Watch*) meyakini bahwa pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi luas dari masyarakat yang menjadi korban. ICW

(*Indonesia Corruption Watch*) berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun gerakan sosial untuk memberantas korupsi serta melawan kolusi antara birokrasi pemerintah dan dunia usaha. Melalui upaya ini, diharapkan reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial dapat terwujud, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial (Herliandhy et al., 2016).

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsisten dalam memperjuangkan terciptanya negara yang bebas dari korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Visi ICW adalah untuk memperkuat posisi rakyat dalam mengontrol negara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, serta adil dalam aspek ekonomi, sosial, dan gender. Sebagai reaksi non-formal, ICW memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain mengkampanyekan antikorupsi, ICW juga aktif dalam melakukan investigasi dan mempublikasikan kasus-kasus korupsi yang sulit diungkap oleh aparat penegak hukum, terutama yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh dengan kekuasaan istimewa. sampai saat ini, korupsi masih menjadi masalah kompleks di masyarakat yang membutuhkan peran serta berbagai pihak untuk dapat diatasi secara efektif (Transparency International, 2010).

Pernyataan mengenai korupsi di Indonesia menunjukkan pentingnya pendidikan antikorupsi yang harus diajarkan sejak dini. Pendidikan tentang korupsi merupakan langkah awal penting dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Tujuan dari pendidikan antikorupsi tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membuka wawasan, mengubah pola pikir, serta mempengaruhi pandangan dan perilaku dalam menjalani kehidupan. Diharapkan, pembelajaran antikorupsi di berbagai tingkat lembaga pendidikan dapat menyelamatkan generasi muda agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku korupsi yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan, melalui reformasi sistem (*constitutional reform*), reformasi kelembagaan (*institutional reform*), dan penegakan hukum (*law enforcement*). Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari reformasi budaya politik yang dilakukan melalui sistem pendidikan, dengan tujuan untuk mendorong perubahan budaya secara berkelanjutan, termasuk menciptakan budaya pemerintahan yang baik (*good governance*) di sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai upaya yang terencana dan sistematis, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar individu mampu mencegah dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Setiap jenis pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula dengan pendidikan antikorupsi. Tujuan utama dari pendidikan antikorupsi antara lain: (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi beserta aspeknya, (2) mengubah pandangan serta sikap terhadap tindakan korupsi, dan (3) mengembangkan keterampilan serta kemampuan baru yang diperlukan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan antikorupsi meliputi tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama, aspek kognitif berfokus pada kemampuan untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, serta menghubungkan ide-ide baru atau mensintesis materi dengan cara yang kreatif. Kedua, aspek afektif berkaitan dengan emosi, sikap, penghargaan, dan nilai, serta tingkat penerimaan dan penolakan terhadap suatu hal. Ketiga, aspek psikomotorik bertujuan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan serta keahlian yang diperlukan untuk membiasakan diri berperilaku antikorupsi dalam kehidupan (Handoyo, 2015).

Pendidikan yang diberikan di sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jalur pendidikan lainnya. Pendidikan di sekolah lebih fokus pada aspek intelektual, yaitu mengisi pengetahuan anak dengan berbagai informasi yang berguna. Sementara itu, pendidikan informal atau yang diberikan dalam keluarga berfungsi untuk membentuk dan memuliakan manusia. Proses pembentukan moral dan pemuliaan anak muda hanya bisa dilakukan melalui

interaksi informal antara anak dan lingkungan, yang dalam hal ini adalah keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, orang tua mendapat dukungan dari masyarakat. Meskipun demikian, pendidikan formal di sekolah, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan intelektual, tetapi juga untuk membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Dengan demikian, sekolah berfungsi tidak hanya sebagai tempat untuk pendidikan intelektual, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan pendidikan nilai. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk watak dan peradaban bangsa, demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nilai dapat dipahami sebagai proses menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dalam diri seseorang. Pendidikan nilai merupakan bentuk pengajaran yang membantu seseorang mengenali nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui pertimbangan yang tepat dan kebiasaan bertindak secara konsisten. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi termasuk dalam kategori pendidikan nilai, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perilaku korupsi dengan memberikan pemahaman dan nilai-nilai positif. Untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah, ada tiga pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu strategi inklusif, eksklusif, dan studi kasus. Mengingat perkembangan kognitif dan emosional anak serta terbatasnya jam pelajaran, strategi inklusif dapat diterapkan dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran yang relevan. Sementara itu, pendekatan eksklusif lebih cocok diterapkan di tingkat pendidikan menengah, seperti dengan memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum lokal atau kegiatan ekstrakurikuler yang lebih menekankan pada pengembangan sikap peserta didik.

Membangun nilai-nilai antikorupsi di kalangan peserta didik SMP yang berusia antara 13 hingga 15 tahun, memiliki karakter yang mirip dengan peserta didik kelas V dan VI SD. Proses pembelajaran antikorupsi kepada mereka difokuskan untuk mempersiapkan mereka agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam setiap tindakan dan perilaku. Nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan

antara lain kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, dan kepedulian (Handoyo, 2015, hlm. 11).

Sekolah memiliki peran penting sebagai pusat pendidikan antikorupsi, terutama dalam menanamkan nilai-nilai perilaku yang bebas dari korupsi. Proses penanaman nilai konsisten dan berkelanjutan akan membentuk sikap yang menjadi bagian dari kepribadian anak. Pengembangan sikap moral dan kepribadian tidak dapat tercapai dalam waktu singkat, karena hal tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang terus-menerus melalui kebiasaan yang diterapkan secara rutin. Penguatan nilai antikorupsi dapat dimulai dengan memperkenalkan konsep-konsep antikorupsi yang lebih mendalam, seperti pentingnya manajemen waktu yang baik, menanamkan semangat saling membantu, dan lainnya.

Pendidikan berfungsi sebagai alat atau sarana individu untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, dan setiap individu memiliki hak untuk mendapatkannya. Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas, yaitu generasi yang mampu memanfaatkan kemajuan dengan optimal. Melalui pendidikan, diharapkan terbentuk generasi yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Tanpa pendidikan yang memadai, kemajuan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan harus diberikan kepada setiap warga negara sejak dini, karena pendidikan adalah kunci utama bagi kemajuan suatu negara. Negara-negara maju umumnya adalah negara yang memprioritaskan pendidikan untuk rakyatnya. Dengan sistem pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Namun, pendidikan tidak akan membawa kemajuan jika sistem yang diterapkan tidak tepat, seperti yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia belakangan ini sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah dalam sistem pendidikan yang berkontribusi pada rendahnya kualitasnya. Pendidikan seharusnya bukan hanya sekedar proses transfer ilmu, tetapi lebih dari itu. Pendidikan harus mampu membantu individu dalam mengembangkan dan mengeksplorasi potensi diri,

Rienzani Callista, 2025

*PENGUATAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KEPADA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN IPS DI KELAS 8 MTS AL-ICHLASH KABUPATEN BEKASI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kecerdasan emosional, serta memahami peran mereka dalam masyarakat. Melalui pendidikan, diharapkan seseorang dapat memperoleh nilai-nilai yang baik, luhur, benar, dan relevan dengan kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan arah bagi seluruh kegiatan pendidikan dan menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam seluruh pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (2003), tujuan pendidikan adalah upaya yang dirancang dengan sadar untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara aktif. Demikian, diharapkan peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Diharapkan, melalui upaya yang dilakukan, karakter dan kepribadian dengan kemampuan unggul akan tumbuh dan berkembang. Lembaga pendidikan formal diharapkan dapat memperkuat perannya dalam membentuk kepribadian peserta didik melalui peningkatan kualitas pendidikan karakter. Berdasarkan pendapat Piaget dalam Azizah Siti Lathifah et al., (2024), tugas guru dalam pembelajaran konstruktivis adalah memfasilitasi proses pembelajaran dengan :

1. Membuat pengetahuan menjadi berarti dan relevan bagi peserta didik.
2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri.
3. Membantu peserta didik menyadari pentingnya menggunakan strategi mereka sendiri dalam belajar.
4. Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter.
5. Membantu peserta didik untuk mengaplikasikan strategi belajar mereka sendiri.

Berdasarkan pendapat Piaget, nomor empat menunjukkan bahwa pendidikan karakter memang harus diberikan dan menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Dalam menerapkan pembelajaran, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, karena seribu nasehat atau himbauan tidak sebanding dengan satu teladan. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter yang baik,

seorang guru harus memiliki karakter yang baik terlebih dahulu agar dapat memberi contoh yang positif kepada peserta didiknya.

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang berfokus pada pemahaman dan penerapan pengetahuan terkait berbagai aspek ilmu sosial. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diajak untuk memahami serta mengaplikasikan pengetahuan tentang fenomena sosial, ekonomi, dan geografi yang terjadi di sekitar peserta didik. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang kehidupan sosial masyarakat, pemahaman dalam berpikir kritis, analitis, kreatif, dan juga solutif. Selain itu, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pembelajaran IPS juga menekankan pada pembentukan karakter peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap, nilai, dan keterampilan sosial. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari serta lingkungan peserta didik, dan mengasah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan geografis yang dihadapi (Amin, 2021).

Pembelajaran IPS memiliki peran sebagai pusat bagi peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus juga untuk membangun komitmen serta kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik akan dibekali dengan kemampuan untuk dapat berkolaborasi dalam masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga perlu dipegang teguh agar peserta didik dapat membentuk karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, sehingga peserta didik akan tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik, berwawasan kebangsaan, serta juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi (Nursa'ban & Supardi, 2023, hlm. 9). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki berbagai ketercakupan dalam pemahaman dan analisis aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat memberikan

dampak signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan beberapa alasan mengapa pembelajaran IPS sangat penting untuk perkembangan karakter peserta didik.

Pertama, pembelajaran IPS memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman sosial dan budaya. Melalui berbagai materi yang diajarkan dalam pembelajaran IPS, peserta didik akan mempelajari berbagai masyarakat, budaya, dan tradisi yang ada, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini tentunya bertujuan untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai keragaman lingkungan sekitarnya.

Kedua, pembelajaran IPS memperkenalkan peserta didik pada nilai-nilai demokrasi dan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui materi yang diberikan, Peserta didik akan mempelajari tentang sistem pemerintahan, proses politik, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Semua ini bertujuan untuk dapat membentuk kesadaran peserta didik akan peran yang harus dijalankan dalam masyarakat.

Pembelajaran IPS juga memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami isu-isu global yang sedang berlangsung. melalui analisis studi kasus dan peristiwa-peristiwa dunia, peserta didik dapat menjelajahi topik-topik seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan ketimpangan sosial. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran peserta didik tentang tantangan global yang ada saat ini dan mengajarkan peserta didik untuk menjadi agen perubahan yang peduli serta bertanggung jawab terhadap masalah-masalah dunia. Selain itu, pembelajaran IPS juga turut membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan kewarganegaraan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan mempelajari cara berkomunikasi dengan efektif, bernegosiasi, bekerja sama, dan membuat keputusan yang tepat dalam berbagai situasi.

Secara keseluruhan, pembelajaran IPS memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui pemahaman mengenai keberagaman sosial dan budaya, nilai-nilai demokrasi, isu-isu global, serta keterampilan sosial, peserta didik dapat mengembangkan sikap yang inklusif,

demokratis, peduli terhadap permasalahan global, dan mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Pembelajaran ini tentunya dapat membantu peserta didik untuk menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.

Mengajarkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kasih sayang, dan berlaku baik kepada orang tua sejak dini merupakan langkah preventif yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak mengembangkan kemampuan dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk (Widodo, 2019). Pendidikan yang melibatkan penerapan model dan strategi pembelajaran antikorupsi sangat penting agar peserta didik dapat membangun integritas diri sejak awal, serta mengutamakan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, peserta didik seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami apa itu korupsi dan dampak yang ditimbulkannya (Becker et al., 2013). Meskipun demikian, penting bagi peserta didik untuk menyadari dan memahami masalah korupsi melalui berbagai upaya strategi, termasuk memberikan contoh atau aktivitas yang bersifat formal maupun informal dalam mengantisipasi korupsi.

Pendekatan yang diterapkan oleh guru dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah atau kelas sangat penting untuk disampaikan dan dikembangkan pada peserta didik. Upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi disusun dalam materi pembelajaran atau sebagai tambahan dalam proses belajar. Contoh-contoh yang mudah dipahami dan sederhana, seperti yang terkait dengan pertemanan, interaksi antar teman, atau dalam keluarga, dapat disampaikan dalam bentuk cerita selama pembelajaran berlangsung. Nasehat atau teladan dari aktivitas tersebut bisa digunakan dalam pembelajaran IPS, agar nilai-nilai antikorupsi dapat diajarkan secara menyeluruh (Widodo, 2019).

Proses belajar mengajar guru perlu adanya perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat memungkinkan peserta didik untuk menyusun pemikiran berdasarkan pengalaman mereka, sehingga peserta didik dapat menemukan cara untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi yang tepat dan benar. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah metode studi kasus. Metode ini bukan hanya sekadar cara mengajar, tetapi juga cara berpikir, karena dimulai dengan pengumpulan data hingga menarik kesimpulan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran juga harus yang memungkinkan untuk melatih peserta didik dalam menyampaikan gagasan pikirannya dan mampu dalam berpendapat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah metode diskusi dan juga metode studi kasus. Dalam metode ini, guru memberikan sebuah masalah kepada siswa untuk dipecahkan bersama-sama dengan teman-temannya. Selama diskusi, siswa saling bertukar informasi, menerima informasi dari orang lain, serta mempertahankan pendapatnya guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pendidikan antikorupsi di dalamnya terdapat pendidikan yang memiliki peran penting, yaitu: mengenalkan fenomena korupsi, serta menjelaskan esensi, alasan, dan dampaknya; mempromosikan sikap tidak toleran terhadap korupsi; menunjukkan cara-cara untuk melawan korupsi dengan pendekatan yang sesuai untuk anak-anak; serta memberikan kontribusi dalam kurikulum standar melalui penanaman nilai-nilai, penguatan kapasitas seperti berpikir kritis, tanggung jawab, penyelesaian konflik, serta kemampuan mengatur diri dalam kehidupan sosial di sekolah, masyarakat, dan lingkungan.

Penanaman nilai pendidikan antikorupsi dapat dibahas dalam berbagai mata pelajaran, seperti Pendidikan Pancasila dan IPS, namun dalam penelitian ini, fokusnya lebih pada penguatan nilai antikorupsi dalam pembelajaran IPS. Penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam IPS bertujuan untuk membentuk sikap peserta didik dalam memahami hubungan sebab-akibat yang bersifat nyata dan konkret. Oleh karena itu, peserta didik diperkenalkan dengan tindakan yang memiliki konsekuensi baik dan buruk. Diharapkan, dengan penguatan nilai-nilai antikorupsi, peserta didik dapat menjadi agen perubahan sosial yang mampu mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih antikorupsi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan sikap-sikap seperti tanggung jawab, disiplin, kejujuran (nilai inti bagi pelajar), kesederhanaan, kerja keras, kemandirian (etika atau gaya hidup

yang harus dimiliki generasi penerus), keadilan, keberanian, dan kepedulian terhadap orang lain disekitarnya.

Penggunaan teori Lickona, teori intervensi, Teori *anticorruption big bang*, teori kebijakan George Edward III, teori *good and clean government*, dan teori manajemen berbasis sekolah (MBS) bertujuan sebagai landasan untuk memahami penguatan nilai-nilai antikorupsi secara menyeluruh. Teori Lickona digunakan karena teori ini lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku. Teori intervensi menjelaskan bagaimana strategi dari pembelajaran yang dapat memengaruhi perubahan dari sikap peserta didik. Teori *anticorruption big bang* berguna untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran IPS, sementara teori kebijakan George Edward III relevan untuk menganalisis mengenai kebijakan dari pendidikan yang sudah diterapkan. Teori *good and clean government* mendasari dari nilai-nilai yang akan diupayakan melalui pembelajaran, dan teori manajemen berbasis sekolah menunjukkan mengenai pengelolaan sekolah dapat mendukung suatu keberhasilan kegiatan pendidikan antikorupsi. Menggabungkan semua teori ini dapat memastikan pendekatan yang diambil menjadi lebih sempurna dan mendalam dalam upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah.

Peneliti memilih judul “Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi Kepada Peserta Didik Dalam Pembelajaran IPS Di Kelas 8 Mts Al-Ichlash Kabupaten Bekasi” karena bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penguatan nilai-nilai antikorupsi, strategi efektif yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap antikorupsi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penguatan nilai-nilai antikorupsi tersebut. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penguatan nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga pada cara menyisipkan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran IPS di dalam kelas, sesuai dengan kompetensi dasar yang relevan dengan pendidikan antikorupsi pada tingkat jenjang pendidikan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rienzani Callista, 2025

**PENGUATAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KEPADA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN IPS DI KELAS 8 MTS AL-ICHLASH KABUPATEN BEKASI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana Kebijakan sekolah dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash?
3. Bagaimana sikap terhadap penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash?
4. Bagaimana pola pembiasaan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Kebijakan sekolah dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash
2. Menganalisis tingkat pengetahuan dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash
3. Menerapkan sikap terhadap penguatan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash
4. Menganalisis pola pembiasaan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini pada dasarnya akan diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan penelitian. Berikut beberapa manfaat yang dapat di sampaikan oleh penulis:

#### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis untuk penelitian adalah menambah ilmu pengetahuan seputar penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran IPS di kelas 8 MTS Al-Ichlash.

#### 2) Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi:

##### a. Pendidik

Bagi pendidik dapat menyediakan strategi praktis untuk integrasi nilai antikorupsi.

b. Peserta didik

Bagi peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya sikap antikorupsi.

c. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan atau refleksi untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitiannya.

d. Pembaca

Bagi pembaca dapat menambah wawasan serta informasi seputar penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran IPS dan dapat mencetak generasi muda yang berintegritas.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk dapat memastikan penelitian tetap fokus pada setiap pokok permasalahan, peneliti menetapkan batasan ruang lingkup penelitian yang mencakup aspek penting. Penetapan ini bertujuan untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta memastikan analisis yang dilakukan ini tetap relevan dan juga mendalam. Adapun ruang lingkup penelitiannya sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang terdapat pada penelitian ini yaitu penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran IPS.
2. Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu peserta didik kelas 8 di Mts Al-Ichlash, Kabupaten Bekasi.
3. Waktu dan tempat yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat pada semester genap tahun ajaran 2024/2025, bertempat di Mts Al-Ichlash Kabupaten Bekasi.
4. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan nilai-nilai antikorupsi dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS di kelas 8 Mts Al-Ichlash Kabupaten Bekasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Penulisan yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Bagian isi karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Sebagai bab pembuka dalam skripsi, bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang relevan, pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar kajian yang memberikan landasan yang kuat mengenai urgensi penelitian yang dilakukan.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu: 1) Desain Penelitian, 2) Partisipan dan lokasi penelitian, 3) Teknik Pengumpulan Data, dan 4) Teknik Analisis Data.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini, disajikan pembahasan yang berisi hasil temuan penelitian serta pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah diteliti.

### **BAB V Simpulan dan Saran**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya maupun pihak terkait yang terkait dalam penelitian ini.